

<input type="radio"/> Senin	<input type="radio"/> Selasa	<input type="radio"/> Rabu	<input checked="" type="radio"/> Kamis	<input type="radio"/> Jumat	<input type="radio"/> Sabtu	<input type="radio"/> Minggu									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
<input type="radio"/> Jan	<input type="radio"/> Feb	<input type="radio"/> Mar	<input type="radio"/> Apr	<input type="radio"/> Mei	<input type="radio"/> Jun	<input type="radio"/> Jul	<input type="radio"/> Ags	<input type="radio"/> Sep	<input checked="" type="radio"/> Okt	<input type="radio"/> Nov	<input type="radio"/> Des				

MEDIASI

Pejabat BI Diminta Tingkatkan Tata Kelola

BANDUNG—Badan Pemeriksa Keuangan menyatakan para pejabat Bank Indonesia diminta untuk meningkatkan tata kelola agar tidak tersandung perkara dalam setiap akhir masa jabatannya.

Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Taufiequrachman Ruki mengungkapkan hampir setiap pejabat tinggi BI harus berhadapan dengan masalah hukum pada akhir periode masa jabatannya.

"Ini sebenarnya mencerminkan betapa berat beban tugas BI," ujarnya, Rabu (10/10).

Mantan Gubernur BI Soedrajat Djiwandono dan Syahril Sabirin, lanjut Ruki, tercatat harus berurusan dengan masalah pencairan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang menyebabkan tiga pejabat tinggi BI dipidana.

Setelah itu, giliran Burhanuddin Abdullah yang menjalani proses hukum dalam kasus aliran dana Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI). Bahkan, kata Ruki, BI ketika dipimpin oleh Boediono yang saat ini menjabat Wakil Presiden masih tersandung kasus Bank Century.

"Saya melihat persoalan ini dari aspek *good governance* yang perlu dicermati, perlu diciptakan tata kelola yang baik di Bank Indonesia," ujarnya. (Antara)